

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Peranan**

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soerjono Soekanto, 2002: 268-269).

Menurut Komaruddin (1994:768), yang dimaksud peranan yaitu:

- 1) Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen
- 2) Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status
- 3) Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok pranata
- 4) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
- 5) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Jadi peranan dapat diartikan sebagai penilaian sejauh mana berfungsinya seseorang atau bagian dari perusahaan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

Dalam perusahaan yang berskala besar serta ruang lingkup yang kompleks dan meluas menyebabkan perusahaan tersebut tidak mungkin lagi dipimpin oleh manajemen secara langsung. Sehingga manajemen harus mengandalkan pada laporan-laporan dan analisis agar dapat memantau dan mengendalikan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen membutuhkan suatu pengendalian internal yang berperan untuk membantu manajemen agar dapat mengendalikan perusahaan secara efektif demi tercapainya sasaran dan tujuan perusahaan.

## **2.1.2. Pengendalian Internal**

### **2.1.2.1. Pengertian Pengendalian Internal**

Pengendalian internal merupakan hal yang sangat penting dalam tercapainya tujuan perusahaan. Manajemen membutuhkan sistem pengendalian yang dapat mencegah kecurangan-kecurangan dalam perusahaan, mampu mengamankan harta perusahaan, serta memberikan keyakinan bahwa laporan-laporan yang diberikan dapat diandalkan. Sehingga manajemen dapat terus menerus memantau apakah kebijakan yang ditetapkan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Mulyadi (2002 : 181) *sistem pengendalian intern adalah suatu sistem yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.*

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa pengendalian internal adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang memiliki tujuan untuk melindungi kekayaan perusahaan, meneliti ketetapan dan sejauh mana laporan-laporan mengenai data akuntansi dapat benar-benar dipercaya, mendorong adanya efisiensi usaha dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan.

#### **2.1.2.2. Konsep Dasar Pengendalian Internal**

Dari pengertian pengendalian internal yang dikemukakan diatas, terdapat beberapa konsep dasar menurut Mulyadi (2002 : 180) sebagai berikut :

1. Pengendalian internal merupakan suatu proses. Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian internal itu sendiri bukan merupakan tujuan. Pengendalian internal merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan, dan infrastruktur entitas.
2. Pengendalian internal dapat diharapkan oleh orang. Pengendalian internal bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personil lain.
3. Pengendalian internal dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian internal dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian

menyebabkan pengendalian internal tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.

4. Pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan : pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

### **2.1.2.3. Tujuan Pengendalian Internal**

Tujuan pengendalian internal menurut COSO yang dikutip oleh Bodnar dan Hopwood (2001 : 182) adalah sebagai berikut :

1. *Effektifeness and efficienc of operations*
2. *Reability of financial reporting*
3. *Compliance with applicable laws and regulations*

Adapun uraian dari tujuan pengendalian internal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Effektifeness and efficienc of operations (Efektifitas dan efisiensi operasi)*

Pengendalian internal dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk mendorong penggunaan sumber daya dalam meningkatkan aktifitas operasi secara efektif dan efisien yang bertujuan untuk mengoptimalkan tujuan organisasi.

2. *Reability of financial reporting (Keandalan laporan keuangan).*

Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan data serta laporan-laporan akuntansi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3. *Compliance with applicable laws and regulations*

Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan.

#### **2.1.2.4. Komponen Pengendalian Internal**

Komponen – komponen pengendalian intern menurut *COSO* terdiri dari lima komponen yang saling berkaitan sebagai berikut:

##### **1. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian perusahaan mencakup sikap para manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada di organisasi tersebut. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan pengendalian adalah filosofi manajemen (manajemen tunggal dalam persekutuan atau manajemen bersama dalam perseroan) dan gaya operasi manajemen (manajemen yang progresif atau yang konservatif), struktur organisasi (terpusat atau terdesentralisasi) serta praktik kepersonaliaan. Lingkungan pengendalian ini amat penting karena menjadi dasar keefektifan unsur-unsur pengendalian intern yang lain. Merupakan dasar dari komponen pengendalian yang lain yang secara umum dapat memberikan acuan disiplin. Meliputi : Integritas, Nilai Etika, Kompetensi personil perusahaan, Falsafah Manajemen dan gaya operasional, cara manajmene di dalam mendelegasikan tugas dan tanggung jawab, mengatur dan mengembangkan personil, serta, arahan yang diberikan oleh dewan direksi.

##### **2. Penilaian Resiko**

Semua organisasi memiliki risiko, dalam kondisi apapun yang namanya risiko pasti ada dalam suatu aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan bisnis

(profit dan non profit) maupun non bisnis. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat di analisis dan evaluasi sehingga dapat di perkirakan intensitas dan tindakan yang dapat meminimalkannya. Identifikasi dan analisa atas resiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan yaitu mengenai penentuan “bagaimana resiko dinilai untuk kemudian dikelola”. Komponen ini hendaknya mengidentifikasi resiko baik internal maupun eksternal untuk kemudian dinilai. Sebelum melakukan penilaian resiko, tujuan atau target hendaknya ditentukan terlebih dahulu dan dikaitkan sesuai dengan level-levelnya.

### **3. Aktivitas Pengendalian**

Prosedur pengendalian ditetapkan untuk menstandarisasi proses kerja sehingga menjamin tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah atau mendeteksi terjadinya ketidakberesan dan kesalahan. Prosedur pengendalian meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Personil yang kompeten, mutasi tugas dan cuti wajib.
- Pelimpahan tanggung jawab.
- Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait.
- Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset dan operasional.

Kebijakan dan prosedur yang dapat membantu mengarahkan manajemen hendaknya dilaksanakan. Aktivitas pengendalian hendaknya dilaksanakan dengan menembus semua level dan semua fungsi yang ada di perusahaan. Meliputi : aktifitas-aktifitas persetujuan, kewenangan, verifikasi, rekonsiliasi, inspeksi atas kinerja operasional, keamanan sumberdaya (aset), pemisahan tugas dan tanggung jawab.

#### **4. Informasi dan Komunikasi**

Informasi dan komunikasi merupakan elemen-elemen yang penting dari pengendalian intern perusahaan. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen Winnebago pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan.

Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal. Hukum, peristiwa dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal.

Menampung kebutuhan perusahaan di dalam mengidentifikasi, mengambil, dan mengkomunikasikan informasi-informasi kepada pihak yang tepat agar mereka mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Di dalam perusahaan (organisasi), Sistem informasi merupakan kunci dari komponen pengendalian ini. Informasi internal maupun kejadian eksternal, aktifitas, dan kondisi maupun prasyarat hendaknya dikomunikasikan agar manajemen memperoleh informasi mengenai keputusan-keputusan bisnis yang harus diambil, dan untuk tujuan pelaporan eksternal.

#### **5. Pengawasan**

Pemantauan terhadap sistem pengendalian intern akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian intern dapat di monitor dengan baik dengan cara penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen. Usaha pemantauan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara

mengamati perilaku karyawan atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh sistem akuntansi.

Penilaian secara khusus biasanya dilakukan secara berkala saat terjadi perubahan pokok dalam strategi manajemen senior, struktur korporasi atau kegiatan usaha. Pada perusahaan besar, auditor internal adalah pihak yang bertanggung jawab atas pemantauan sistem pengendalian intern. Auditor independen juga sering melakukan penilaian atas pengendalian intern sebagai bagian dari audit atas laporan keuangan.

Pengendalian intern seharusnya diawasi oleh manajemen dan personil di dalam perusahaan. Ini merupakan kerangka kerja yang diasosiasikan dengan fungsi internal audit di dalam perusahaan (organisasi), juga dipandang sebagai pengawasan seperti aktifitas umum manajemen dan aktivitas supervise. Adalah penting bahwa defisiensi pengendalian intern hendaknya dilaporkan ke atas. Dan pemborosan yang serius seharusnya dilaporkan kepada manajemen puncak dan dewan direksi.

Kelima komponen ini terkait satu dengan yang lainnya, sehingga dapat memberikan kinerja sistem yang terintegrasi yang dapat merespon perubahan kondisi secara dinamis. Sistem Pengendalian Internal terjalin dengan aktifitas operasional perusahaan, dana akan lebih efektif apabila pengendalian dibangun ke dalam infrastruktur perusahaan, untuk kemudian menjadi bagian yang paling esensial dari perusahaan (organisasi).



### 2.1.2.5. Keterbatasan Pengendalian Internal

Tidak ada satu pun sistem pengendalian internal yang dianggap sepenuhnya efektif karena selalu ada kemungkinan bahwa data yang dihasilkannya tidak akurat akibat adanya keterbatasan dalam pengendalian internal yang dapat mengakibatkan tujuan dari pengendalian internal tidak akan tercapai.

Keterbatasan-keterbatasan tersebut menurut *Mulyadi (2002 : 181)* adalah:

- a. Kesalahan dalam pertimbangan
- b. Gangguan
- c. Kolusi
- d. Pengabaian oleh manajemen
- e. Biaya lawan manfaat

Keterbatasan pengendalian internal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kesalahan dalam pertimbangan

Kesalahan dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin yang biasanya dilakukan oleh manajemen atau personel lain. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh tidak memadainya informasi yang diterima, keterbatasan waktu, dan tekanan lain.

- b. Gangguan

Adanya kekeliruan dalam memahami perintah, terjadinya kesalahan karena kelalaian dan perubahan yang bersifat sementara atau permanent dalam personil atau dalam sistem dan prosedur yang diterapkan.

- c. Kolusi

Kerja sama antara pihak-pihak yang terkait, yang mana seharusnya antara pihak-pihak tersebut saling mengawasi, tetapi malah saling bekerja sama untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang dibuat baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

d. Pengabaian oleh manajemen

Manajemen mengabaikan kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan semata-mata untuk kepentingan pribadinya sehingga pengendalian internal tidak berfungsi secara baik.

e. Biaya lawan manfaat

Biaya yang telah dikeluarkan untuk penerapan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari adanya penerapan pengendalian internal tersebut.

### 2.1.3. Kredit

#### 2.1.3.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu, dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa uang, barang atau jasa.

Pengertian Kredit menurut **Pedoman Akuntan Perbankan Indonesia atau PAPI (2001 : III.8a.1 )**, yaitu:

*Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk dalam pengertian yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga debitur yang dilengkapi dengan note purchase agreement (NPA).*

Adapun pengertian kredit menurut **Undang-Undang No. 10 tentang perbankan (Republik Indonesia, 1998)** yaitu : *“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”*

### **2.1.3.2 Unsur-Unsur Kredit**

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa.

#### **a. Kepercayaan**

Kepercayaan adalah suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.

#### **b. Kesepakatan**

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

d. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/pemberian kredit macet. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut, yang disebut bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

### 2.1.3.3 Jenis-Jenis Kredit

Kredit terdiri dari beberapa jenis bila dilihat dari berbagai pandangan.

Adapun Jenis-jenis kredit menurut **Kasmir (2006 : 76)** adalah :

⇒ Dilihat dari segi kegunaan, kredit terdiri atas kredit investasi dan kredit modal kerja.

1) Kredit Investasi adalah Kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha baru dimana masa pemakaiannya relatif lebih lama dan biasanya kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

2) Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan operasionalnya.

⇒ Dilihat dari segi tujuan, kredit terdiri atas kredit produktif, kredit konsumtif dan kredit perdagangan.

1) Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi.

2) Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi

3) Kredit perdagangan adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

⇒ Dilihat dari segi jangka waktu, kredit terdiri atas kredit jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang

1) Kredit jangka pendek adalah kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja

- 2) Kredit jangka menengah adalah jangka waktunya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 2 tahun, dapat diberikan untuk modal kerja.
  - 3) Kredit jangka panjang adalah kredit yang masa pengembaliannya yaitu 3 tahun atau 5 tahun
- ⇒ Dilihat dari segi jaminan, kredit terdiri atas kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan
- ⇒ Dilihat dari sektor usaha, kredit terdiri atas kredit pertanian, kredit peternakan, Kredit industri, Kredit pertambangan, Kredit pendidikan, Kredit profesi, Kredit perumahan, dan sektor-sektor usaha lainnya

#### 2.1.3.4 Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan lepas dari misi bank tersebut didirikan.

Menurut **Kasmir (2002:105)** dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan* lainnya ada beberapa tujuan umum pemberian suatu kredit antara lain :

a. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana

tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. **Membantu Pemerintah**

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan pemberian kredit adalah :

- 1) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- 2) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa
- 4) Menghemat devisa negara, terutama untuk produ-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi didalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.

**2.1.3.5 Fungsi Kredit**

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi pada kemajuan usahanya itu, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Suatu kredit mencapai fungsinya, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat, apabila secara sosial

ekonomis membawa pengaruh yang lebih baik. Baik bagi pihak debitur dan kreditur, mereka sama-sama memperoleh keuntungan, dan juga mengakibatkan tambahan penerimaan Negara dari pajak, serta membawa dampak kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.

Menurut **Untung (2000:4)** Kredit dalam kehidupan perekonomian sekarang, dan juga dalam perdagangan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya beli uang
2. Meningkatnya peredaran dan lalu lintas uang
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
4. Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi, dalam hal ini untuk:
  - Pengendalian inflasi
  - Peningkatan ekspor
  - Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat
5. Meningkatkan kegairahan berusaha
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan
7. Meningkatkan hubungan internasional.

#### **2.1.4. Sistem Pemberian Kredit**

Sistem pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan operasi pada tata usaha koperasi yang termuat dalam sistem akuntansi manual suatu koperasi. Sistem pemberian kredit tersebut tercakup dalam prosedur pemberian kredit yang didalamnya didukung dengan prinsip-prinsip pemberian kredit.



#### 2.1.4.1. Prinsip Pemberian Kredit

Perlu adanya pertimbangan dan kehati-hatian dalam sistem pemberian kredit agar tercipta kepercayaan dalam kredit sehingga kredit yang diberikan tepat pada sasaran dan pengembalian kredit dapat terjamin pengembaliannya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian.

Ada 3 (tiga) macam konsep tentang prinsip pemberian kredit yaitu :

1. Prinsip 5 C
2. Prinsip 7 P
3. Prinsip 3 R

Adapun penjelasan mengenai prinsip – prinsip pemberian kredit tersebut adalah seagai berikut :

1. **Prinsip 5 C** menurut *Rahmat Firdaus dan Maya Arianti dalam bukunya Manajemen Perkreditan Bank Umum (2004:83)* meliputi :

- a) *Character* (Watak atau Kepribadian)

Dasar dari suatu pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif serta mempunyai tanggungjawab yang baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

- b) *Capacity* (Kemampuan)

Yang dimaksud *capacity* disini yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari

kegiatan usaha yang akan atau sedang dilakukannya. Jadi jelaslah bahwa penilaian *capacity* dilakukan untuk menilai sampai sejauh mana hasil yang diperoleh calon debitur dalam mengelola perusahaannya untuk melunasi hutang-hutangnya pada waktunya.

c) *Capital* (Modal)

Yaitu jumlah dana atau modal dasar yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini kelihatan kontradiktif dengan tujuan kredit yang berfungsi sebagai penyedia dana, namun demikian halnya dalam kaitan bisnis yang murni, semakin kaya seseorang, ia semakin dipercaya untuk memperoleh kredit. Dan secara rasional hal ini tentu tidaklah mengherankan, sebab seorang calon debitur yang telah menanamkan dananya dalam proporsi yang besar dibandingkan dengan kredit kesungguhan. Kemampuan modal sendiri ini merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah terkena guncangan dari luar.

d) *Collateral* (Jaminan atau Agunan)

Yang dimaksud dengan *collateral* ini yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam/debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat *collateral* yaitu sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal. Jaminan juga dapat dipakai sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada kurun waktu yang akan datang saat kredit tersebut harus dilunasi.

e) *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Yang dimaksud dengan *condition of economy* yaitu situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit. *Condition of economy* sangat penting untuk diketahui apabila kredit tersebut diberikan untuk perusahaan-perusahaan di luar negeri.

2. **Prinsip 7P** menurut Kasmir dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (2003:104) meliputi:

a) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari kepribadian atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda dari bank.

c) *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan

kredit dapat bermacam-macam, sebagai contoh untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan sebagainya.

d) *Prospect*

Yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa memiliki prospek, bukan hanya bank yang akan rugi, tetapi juga nasabah.

e) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi dari sektor lainnya.

f) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana perusahaan mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh.

g) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

3. **Prinsip 3R** menurut Hadiwidjadja, dan kawan-kawan (2004:39) dalam bukunya Analisis Kredit adalah sebagai berikut:

a) *Return* (hasil yang dicapai)

Penilaian akan hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur dengan kredit, apakah hasil tersebut dapat menutup pengembalian pinjamannya dan perusahaan bisa berkembang terus atau tidak.

b) *Repayment* (pembayaran kembali)

Bank harus menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kembali pinjamannya pada saat kredit harus dicicil atau dilunasi.

c) *Risk bearing ability* (kemampuan untuk menanggung risiko)

Bank harus menilai sampai sejauh mana perusahaan mampu menanggung risiko kegagalan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

#### 2.1.4.2. **Prosedur Pemberian Kredit**

Prosedur pemberian kredit adalah rangkaian kegiatan yang harus dilalui oleh suatu permohonan kredit sejak permohonan tersebut diajukan oleh kreditur sampai disetujui oleh koperasi, dipergunakan oleh kreditur, dan sampai pada akhirnya dilunasi oleh kreditur.

Tujuan prosedur pemberian kredit yaitu untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak.

Tahapan-tahapan dalam proses pemberian kredit menurut **M.Tohar (2004:107-111)** urutan kegiatan dalam penyaluran kredit adalah sebagai berikut:

1. Permohonan kredit
2. Evaluasi atau analisis kredit
3. Keputusan pinjaman
4. Perjanjian pinjaman
5. Pencairan pinjaman.”

Yang dijelaskan dalam uraian dibawah ini :

1. Permohonan kredit

Pada umumnya dilakukan dengan mengisi formulir permohonan kredit, antara lain:

- a) Calon peminjam terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pinjaman yang telah tersedia.
- b) Petugas memberikan petunjuk serta bimbingan kepada calon dalam pengisian formulir.
- c) Proses permohonan diteruskan untuk diproses.

2. Evaluasi atau analisis kredit

Fungsi utama dari evaluasi atau analisis pinjaman adalah untuk menilai sampai sejauh mana kredit tersebut diperlukan oleh calon peminjam dan menilai kondisi serta kemampuan peminjam untuk melunasi pinjaman tersebut, rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengevaluasi pinjaman adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan interview pada calon peminjam

Tujuan dari interview atau tanya jawab ini adalah:

- Mengetahui sampai sejauh mana calon penerima kredit menguasai kegiatan usahanya.
- Meneliti kembali kebenaran data atau informasi yang diterima.
- Mengenal lebih dekat pribadi serta sifat dan watak dari calon peminjam.
- Mengetahui hal-hal lain dari calon peminjam seperti latar belakang kehidupan pendidikan dan pengalaman usaha.

b) Melaksanakan survey

Survey dilakukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai pihak tentang:

- Reputasi dan kondisi calon peminjam
- Hubungan dengan pemberi kredit bank atau koperasi lain dan kondisinya sampai saat ini.
- Penilaian dari teman, rekan usaha atau tetangga.

c) Melakukan peninjauan ke tempat usaha

Hal ini dilakukan apabila sifat, jenis usaha calon peminjam benar-benar memerlukan untuk ditinjau guna melihat sejauh mana perkembangannya.

3. Keputusan pinjaman

- a) Setiap permohonan pinjaman memperoleh wewenang dari pengurus koperasi.
- b) Manajer simpan pinjam dalam mengambil keputusan mempergunakan bahan pertimbangan sebagai berikut:

- Hasil evaluasi dari permohonan pinjaman, rekomendasi dari pengurus kelompok.
  - Informasi lain yang diperoleh dari sumber lain sepanjang menyangkut calon peminjam.
- c) Ketentuan peminjam yang tertulis dalam lembaran evaluasi yang memuat:
- Jumlah pinjaman yang di setuju
  - Penggunaan pinjaman
  - Besarnya bunga pinjaman
  - Tanggal jatuh tempo pinjaman
  - Jaminan pinjaman
- d) Setiap keputusan yang diambil harus ditanda tangani manager simpan pinjam koperasi yang bersangkutan.
4. Perjanjian pinjaman
- Perjanjian pinjaman berisi hal-hal berikut ini :
- a) Perjanjian pinjaman merupakan hal yang harus dilaksanakan sebelum kredit di cairkan.
  - b) Penandatanganan perjanjian baru harus dapat dilakukan setelah adanya keputusan
  - c) Pinjaman dari hasil evaluasi.
  - d) Perjanjian pinjaman tersebut dilaksanakan dengan meliputi surat perjanjian pinjaman dan surat kuasa menjual memindah hak.
  - e) Surat perjanjian yang asli harus disimpan koperasi .



- f) Penandatanganan perjanjian dilaksanakan di kantor koperasi.
- g) Copy dari perjanjian harus dipegang oleh peminjam.

#### 5. Pencairan pinjaman

Pencairan pinjaman merupakan tahap akhir setelah ketentuan-ketentuan di penuhi oleh peminjam. Peminjam harus menandatangani kuitansi rangkap 2 sebagai bukti tanda terima uang tersebut. Yang asli ada pada kasir sedangkan kopinya ada pada peminjam, pinjaman ini diberikan secara tunai dan tidak di benarkan dalam bentuk lain. Bilamana memungkinkan pencairannya di usahakan secara bertahap, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut.

Jadi Prosedur peminjaman kredit pada koperasi adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan di dalam mengelola permohonan kredit dari saat permohonan diterima sampai dengan pencairan dana kredit. Manfaat prosedur pemberian kredit adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggota, untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam permohonan kredit dan untuk mengusahakan pemberian kredit dalam waktu relatif singkat.

#### 2.1.5. Efektifitas

Dalam kegiatannya bagian kredit harus mengetahui secara rinci mengenai jenis kredit yang bagaimana yang diperlukan oleh nasabahnya. Masalah efisiensi dan efektifitas menjadi hal yang sangat penting dalam kondisi yang semakin kompetitif ini.

### 2.1.5.1. Pengertian Efektivitas

Definisi efektivitas menurut **Komarudin (2004:769)** adalah sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjang tingkat keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas cenderung pada pencapaian suatu hasil yang berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

### 2.1.5.2. Efektifitas Pemberian Kredit

Karena efektivitas sangat berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai maka untuk mencapai efektivitas pemberian kredit perlu diketahui tujuan pemberian kredit yang diharapkan.

Menurut **Marbun (2006: 41)** efektivitas pemberian kredit adalah tercapainya prinsip - prinsip perkreditan yang dikenal dengan 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan conditon of economic*. Apabila prinsip tersebut telah terpenuhi, diharapkan tujuan pemberian kredit akan tercapai. Di samping itu perlu dilaksanakannya prosedur pemberian kredit yang meliputi permohonan kredit, analisis kredit, keputusan kredit, perjanjian kredit serta pencairan kredit.

Selain tercapainya prinsip dan prosedur kredit tersebut, suatu sistem pemberian kredit dikatakan efektif apabila kredit yang diberikan dapat kembali

tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dengan sejumlah bunga yang telah ditentukan.

## 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

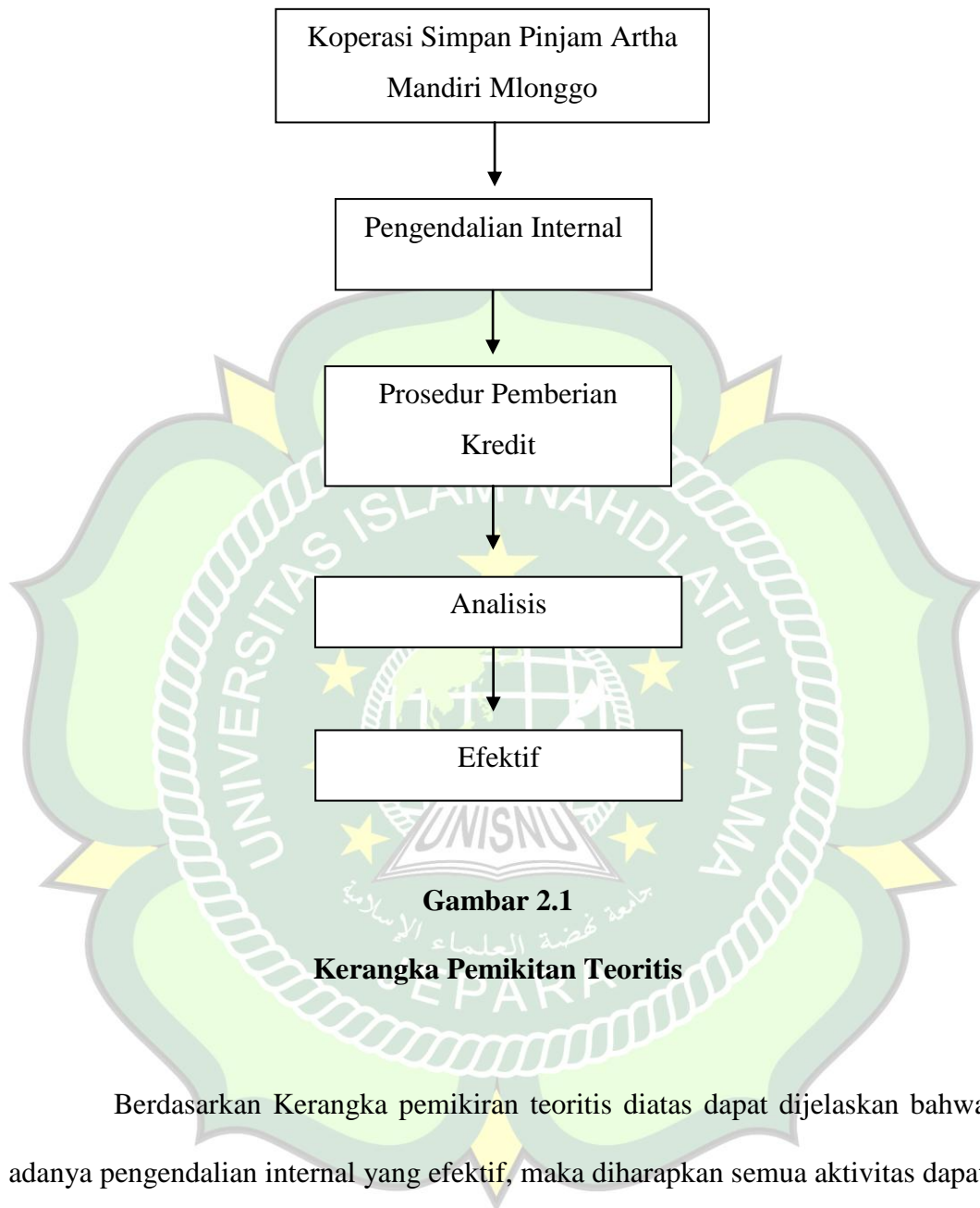
Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

**Tabel 2.1**  
**Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Nama Penulis / Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Prilly Lakoy dan Agus Tony Poputra	Peranan Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagang dalam Menunjang Efektivitas	Studi Kasus	Dari analisis yang dilakukan dijelaskan bahwa Pengendalian internal sudah cukup efektif dalam menunjang efektivitas pengelolaan.

		Pengelolaan		
2	Rosita Ayu Saraswati	Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pegawai Kredit terhadap Efektivitas Pemberian Kredit.	Deskriptif	Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti dijelaskan bahwa analisis laporan keuangan, penilaian 5C calon debitur dan pegawai kredit sudah cukup efektif dalam pemberian kredit.
3	Munawaroh	Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektifitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah	Studi Kasus	Pengendalian Internal sangat berperan dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit usaha kecil dan menengah.

### 2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis



Berdasarkan Kerangka pemikiran teoritis diatas dapat dijelaskan bahwa adanya pengendalian internal yang efektif, maka diharapkan semua aktivitas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini komponen pengendalian internal yang digunakan peneliti untuk meneliti sistem pengendalian internal di Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri Mlonggo. Kemudian dengan konsep tersebut penulis akan

mengkombinasikan dengan pelaksanaan prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Mandiri Mlonggo.

Selanjutnya akan dilakukan analisis yang pada akhirnya dapat diketahui apakah sistem pemberian kredit sudah berjalan cukup efektif atau tidak dengan adanya peran pengendalian internal.

